
PENGELOLAAN DESA WISATA BAHARI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajadi Nugrahani

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email : hida.khairul01@gmail.com dan henny.saptatia@ui.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 18 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi 12 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi	<i>The development of the nautical goddess is an effort to increase the economic added value of the utilization of marine and fishery services by optimizing the role of the community. Kaliwlingi village is one of the villages in the north coast of Java, precisely in brebes subdistrict, brebes regency, central Java province. Management of mangrove ecosystem areas that can be done by the local government in accordance with the principles of sustainable development is ecotourism. Mangrove ecotourism is one form of tourism with participatory community involvement to conserve mangrove ecosystems. Ecotourism is an alternative to proper management of natural resources by maintaining an ecosystem that is still natural through the role and contribution of the community. The theory used is the theory of sustainable development, the theory of the characteristics of coastal ecosystems. the methodology used by researchers is qualitative, with the expected results are in the perspective of national resilience with the concept of tourism villages, not only by simply branding, but also must have a sustainable concept, a resilience of a small scope is required first. With the strong resilience, the growth and progress of tourism villages will be more advanced, especially marine tourism.</i>
Keywords: <i>tourist village; national defence; kaliwlingi village; marine tourist</i>	
	ABSTRAK Pembangunan dewi bahari merupakan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan peran masyarakat. Desa kaliwlingi merupakan salah satu desa di wilayah pesisir utara Jawa, tepatnya di kecamatan brebes, kabupaten brebes, provinsi jawa tengah. Pengelolaan kawasan ekosistem <i>mangrove</i> yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah ekowisata. Ekowisata <i>mangrove</i> merupakan salah satu bentuk wisata dengan

Kata kunci:

desa wisata; ketahanan nasional; desa kaliwlingi; wisata bahari

pelibatan masyarakat secara partisipatif untuk mengkonservasi ekosistem *mangrove*. Ekowisata merupakan alternatif pengelolaan sumberdaya alam yang tepat dengan mempertahankan ekosistem yang masih alami melalui peran dan kontribusi masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori pembangunan berkelanjutan, teori karakteristik ekosistem pesisir. metodologi yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif, dengan hasil yang diharapkan adalah dalam perspektif ketahanan nasional dengan konsep desa wisata, tidak hanya dengan sekedar branding, tetapi juga harus mempunyai konsep yang berkelanjutan, diperlukan sebuah ketahanan dari ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu. Dengan adanya ketahanan yang kuat, maka pertumbuhan dan kemajuan desa wisata akan semakin maju, terutama pariwisata bahari.

Pendahuluan

Wisata bahari merupakan kegiatan berwisata yang mengandalkan daya tarik panorama alam dan lingkungan pesisir dan lautan dengan aktivitas minat khusus yang berupa kegiatan memancing, *snorkeling*, berenang, menyelam, berlayar, berselancar, rekreasi pantai, berjemur, dan lain-lain, yang memanfaatkan area pesisir sebagai wahana utamanya. Kontribusi pariwisata bahari terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi negara (Dahuri et al., 2001).

Pengembangan wisata bahari melalui pendekatan potensi desa dengan pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi daya tarik wisata dapat dikembangkan menjadi desa wisata bahari atau yang disebut dewi bahari. Pembangunan dewi bahari merupakan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan peran masyarakat. Desa kaliwlingi merupakan salah satu desa di wilayah pesisir utara jawa, tepatnya di kecamatan brebes, kabupaten brebes, provinsi jawa tengah. Pada tahun 1983 wilayah pantai kabupaten brebes, provinsi jawa tengah sepanjang 65,48 km, ditumbuhi *mangrove* seluas 2.372 ha. Namun pada tahun 2013 luasan *mangrove* tersebut hanya tersisa 243,20 ha (Suyono et al., 2015). Hal ini menunjukkan adanya kerusakan *mangrove* yang cukup signifikan, salah satu penyebab kerusakan adalah adanya penebangan dan konversi ekosistem *mangrove* menjadi lahan tambak. Berdasarkan informasi dari dinas kelautan dan perikanan brebes tahun 2010 *mangrove* yang terkonsentrasi di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes seluas 68 hektar berada dalam kondisi baik, 20 ha diantaranya dalam kondisi rusak berat (Cerlyawati et al., 2017). Kerusakan ekosistem *mangrove* tersebut mengakibatkan terjadinya abrasi di kawasan pantai utara brebes. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok masyarakat menginisiasi penanaman *mangrove*/sabuk hijau sebagai upaya membendung laju abrasi di pesisir pantai sepanjang 1,8 km. Inisiasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata bahari

di desa Kaliwlingi merupakan prinsip dasar ketangguhan desa dalam pengembangan potensi daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faperi et al., 2015) dari hasil intepretasi data satelit landsat 7 TM pada tahun 2013 dengan metode NDVI menunjukkan bahwa luasan *mangrove* di kabupaten brebes hanya 243, 20 hektar, tersebar di beberapa wilayah kecamatan salah satunya Kecamatan Brebes (Kaliwlingi dan Randusanga) yaitu 161,31 ha. Sedangkan hasil studi yang dilakukan oleh (Albana, 2017) menunjukkan bahwa saat ini luasan ekosistem *mangrove* di Desa Kaliwlingi mencapai 207 ha dan terus tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa luasan hutan *mangrove* di desa kaliwilingi kabupaten brebes terus mengalami peningkatan.

Pengelolaan ekosistem *mangrove* diatur dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem *mangrove* dan merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat dalam upaya perlindungan ekosistem pesisir. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah (pemda) akan memegang peranan penting dalam mengelola kawasan *mangrove* berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dikategorikan sebagai kawasan penting yang perlu untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Salah satu alternatif pengelolaan kawasan ekosistem *mangrove* yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah ekowisata. Ekowisata *mangrove* merupakan salah satu bentuk wisata dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk mengkonservasi ekosistem *mangrove*. Ekowisata merupakan alternatif pengelolaan sumberdaya alam yang tepat dengan mempertahankan ekosistem yang masih alami melalui peran dan kontribusi masyarakat. Ekowisata dapat berkontribusi pada konservasi dan pembangunan yang mempunyai hubungan sinergis positif antara pariwisata dengan keanekaragaman hayati dan melibatkan masyarakat lokal yang dibekali manajemen pengelolaan kawasan wisata (Ross & Wall, 1999).

Pengelolaan ekosistem wisata *mangrove* secara berkelanjutan sudah tentu merupakan hal yang harus dicapai mengingat peran penting ekosistem tersebut bagi wilayah pesisir dan laut. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan sudah tentu akan menghilangkan manfaat wilayah tersebut, yang jika terjadi kerusakan secara permanen maka bukan hanya manfaat ekonomi maupun sosialnya saja yang hilang akan tetapi manfaat ekologis pun akan menghilang. Ekosistem *mangrove* yang terpelihara dengan baik di desa kaliwlingi ternyata menarik wisatawan, sehingga ekosistem *mangrove* di kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata *mangrove*. Seperti halnya dengan kondisi ekosistem *mangrove* di kaliwlingi, (Prasenja et al., 2017) menyimpulkan bahwa kondisi ekosistem *mangrove* di Pulau Lusi, Sidoarjo saat ini sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan ekomina wisata *mangrove*, namun masih perlu adanya penambahan pada beberapa parameter seperti menambah keanekaragaman *mangrove* dan penangkaran satwa untuk menjadikan ekosistem yang lebih baik. Berkembangnya obyek wisata *mangrove* pada akhirnya berdampak kepada kondisi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Kebijakan pengelolaan atau pengembangan wisata bahari daerah melalui kegiatan ekowisata yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pariwisata di daerah yang berbasis konservasi sumberdaya alam, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui ekowisata. Kondisi ini berkaitan erat dengan pendekatan ketahanan nasional di bidang pariwisata. Masyarakat pesisir yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata bahari atau desa wisata bahari akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan desa dan pada akhirnya akan memberikan dampak pada ketahanan wilayah pesisir dan ketahanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan perkembangan desa wisata yang ada di brebes, jawa tengah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan desa wisata bahari yang ada di brebes jawa tengah. Menurut (Santoso et al., 2000) dan (Prasenja et al., 2017) keterkaitannya dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan ekosistem *mangrove* hendaknya mencakup beberapa bentuk kegiatan pokok, yakni:

1. Pengusahaan ekosistem *mangrove* yang kegiatannya dapat dikendalikan dengan penerapan sistem silvikultur, pengaturan kontrak dan pemberian konsensi.
2. Perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove yang dilakukan dengan cara menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan ekosistem *mangrove* menjadi ekosistem lindung, ekosistem konservasi (suaka alam, taman nasional, taman ekosistem raya, ekosistem wisata, dan lain sebagainya) dan kawasan lindung lainnya (jalur hijau, sempadan pantai/sungai, dan lain sebagainya).
3. Rehabilitasi kawasan *mangrove* yang rusak sesuai dengan tujuan pengelolaannya dengan pendekatan pelaksanaan dan penggunaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang tepat guna.
4. Penanganan kerusakan dan pengelolaan ekosistem *mangrove* secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Manfaat adanya teori pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistem secara berkelanjutan baik saat ini hingga masa yang akan datang (*Prasenja, 2017*). Masyarakat pesisir yang secara ekonomi termajinalkan, dengan pelibatan secara aktif dalam pengelolaan wisata bahari mampu meningkatkan taraf hidupnya dan kondisi ekosistem tetap terjaga dengan baik.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Sarana Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah batas administrasi kabupaten/kota.

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (*Sabarisman, 2017*). Menurut undang-undang no 1 tahun 2014 masyarakat pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan pemilik, nelayan buruh, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, dan lain lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir dalam aktivitas sosial ekonominya.

(*Rini, 2013*) menyatakan masyarakat pesisir tergolong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, masyarakat perairan, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir tradisional. Pada umumnya masyarakat pesisir Indonesia lekat dengan kesenjangan sosial ekonomi, rata-rata masyarakat pesisir masih hidup pada garis kemiskinan bahkan tidak sedikit yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir saat ini menurut (*Tuwo, 2011*) masih didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan, sedangkan kegiatan ekonomi lainnya seperti ekowisata pesisir dan laut masih belum berkembang dengan baik. Selain itu kegiatan penangkapan masih dalam skala kecil dengan produksi yang belum memadai, dan biaya operasional yang tinggi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

2. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme. Undang-undang republik indonesia no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. *United nations for world tourism organization* (UNWTO) mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan dari konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dikeluarkan oleh *UN world commission on environment and development* (UNWCED). Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut terus dikembangkan, hingga pada KTT bumi tahun 2002 lahir lima kesepakatan yang erat kaitannya dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya bidang kepariwisataan (Qodriyatun, R.N, Andina E, Suryani A.S, Indahri Y, 2018). UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai kegiatan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan disaat ini dan masa depan, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat lokal.

Menurut (Yazdi, 2012) pariwisata berkelanjutan adalah konsep terbaru yang digunakan untuk mencerminkan kebutuhan akan analisis dan pengelolaan pariwisata yang komprehensif baik sebagai bisnis maupun pengalaman. Tujuan pariwisata berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa suatu pembangunan membawa pengalaman positif bagi masyarakat lokal, perusahaan pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Akan tetapi pada perkembangannya pariwisata saat ini memiliki masalah, hal ini dikarenakan adanya kecanduan pertumbuhan pariwisata yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan (Desbiolles-F Higgins, 2018) menyatakan bahwa pariwisata harus dipahami dan dikelola dengan konteks keberlanjutan yang lebih luas. Selain itu, pendekatan strategis untuk transisi ke pendekatan kecukupan untuk pariwisata dan liburan sangat penting jika keberlanjutan ingin diamankan. Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain: mengubah organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) menjadi kantor pusat untuk mobilitas berkelanjutan, menciptakan dana kekayaan pariwisata global, memupuk beragam pendekatan strategi pariwisata untuk pengembangan dan mengatur serta mengelola pariwisata untuk akuntansi yang lebih seimbang dan berkeadilan, batas ekologis, manfaat untuk manusia dan masa depan yang berkelanjutan.

3. Ekowisata

Ekowisata merupakan aktivitas yang memadukan kegiatan konservasi dan wisata. Ekowisata (*ecotourism*) adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Wood, 2002). Menurut (Barkauskiene & Snieska, 2013) ekowisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial, serta lingkungan ekonomi masa depan dan hak untuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan

(alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

4. Ketahanan Ekonomi dan Pariwisata

Kolaborasi stakeholder yang bersifat vertikal maupun *horizontal* tentu diperlukan dalam mencapai stabilisasi ekonomi. Perlu ditingkatkannya kolaborasi antar pemerintah pusat dengan daerah dalam hal peralihan kekuasaan, koordinasi dan tanggung jawab, antar pemerintah dengan lembaga keuangan dan moneter dalam hal pembuatan regulasi kebijakan ekonomi, antar pemerintah dengan perusahaan maupun individu penyedia jasa pariwisata dengan saling mendukung langkah inovasi baru, serta kolaborasi antar pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam hal sosialisasi kebijakan, serta jaminan keamanan penggunaan ekonomi digital (Hojeghan & Esfangareh, 2011) melihat bahwa pemerintah perlu melakukan tiga hal yaitu:

1. Meningkatkan hukum dan kerangka peraturan
2. Memperkuat digitalisasi keuangan
3. Memfasilitasi transformasi elektronik dalam industri. Konsep digitalisasi ekonomi dan sektor pariwisata yang berkesinambungan dapat menghasilkan sebuah pergeseran dari destinasi tradisional ke arah konsep yang baru dimana terdapat perubahan antara hubungan turis dengan lokasi wisata.

Dengan adanya pola kolaborasi yang terorganisasi antara keseluruhan elemen stakeholder, maka percepatan normalisasi ekonomi di sektor pariwisata bukanlah hal yang tidak mungkin. Jika stabilitas ekonomi tercapai, maka kondisi ketahanan ekonomi nasional pun akan terwujud. Ketahanan nasional adalah kapasitas individu, komunitas atau sistem untuk beradaptasi untuk mempertahankan tingkat fungsi, struktur, dan identitas yang dapat diterima. (*The Demos Publication Resilient Nation, Emergerncy Response and Recovery* (2009), london, cabinet office. Sedangkan menurut OECD (2008) ketahanan nasional adalah yang mampu menyerap guncangan dan mengubah serta menyalurkan perubahan atau tantangan radikal sambil menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan. Ketahanan nasional menunjukkan kapasitas dan legitimasi untuk mengatur populasi dan wilayahnya. Sedangkan menurut NATO (2018) adalah kemampuan masyarakat untuk melawan dan pulih dengan mudah dan cepat dari guncangan dan menggabungkan kesiapsiagaan sipil dan kapasitas militer. Dalam hal ini adalah perihal terkait dengan hal ketahanan ekonomi untuk membentuk satu kesatuan. Dalam konsep kemajuan melalui ketahanan nasionalnya, pariwisata nya di desa wisata brebes bisa memberikan dampak positif dengan adanya konsep berkelanjutan dan warga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran maka akan berdampak kepada ketahanan nasional.

Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan desa wisata, pemerintah harus tetap konsisten pada program berkelanjutan agar bisa menghasilkan program pelaksanaan yang optimal.
2. Pemerintah dapat memberlakukan kerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk meningkatkan pariwisata demi kemajuan desa wisata di brebes.
3. Terdapat sertifikasi bagi lokasi wisata dan para pekerja di sektor pariwisata sehingga memberikan kepercayaan dan keselamatan wisatawan selama *New Normal Tourism* pada masa pandemi covid-19 di indonesia.
4. Pemerintah melakukan pengecekan secara berkala di tempat-tempat wisata, untuk memantau perkembangan hasil kerjasama dengan konsep ketahanan nasional dan ketahanan ekonomi.

BIBLIOGRAFI

- Albana, H. H. (2017). *Analisis Potensi dan Daya Dukung Potensi Obyek Wisata Hutan Mangrove Pandansari di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Barkauskiene, K., & Snieska, V. (2013). Ecotourism as An Integral Part of Sustainable Tourism Development. *Economics & Management*, 18(3).
- Cerlyawati, H., Anggoro, S., & Zainuri, M. (2017). *Strategi Pengelolaan Lingkungan pada Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Desa Kaliwlingi Brebes, Desa Mojo Pemalang, Dan Desa Bedono, Demak*. School of Postgraduate.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, dan M. J. (2001). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. *PT. Pradnya Paramita. Jakarta*, 328.
- Desbiolles-F Higgins. (2018). Sustainable Tourism: Sustaining Tourism or Something More. In *Tourism Management Perspectives* (Vol. 99, Issue 25 (October)). University of Chicago Press.
- Faperi, S., Hendrarto, I. B., & Radjasa, O. K. (2015). Management Strategies of Mangrove Degradation in Coastal Areas of Brebes Regency, Central Java, Indonesia. *Journal of Coastal Zone Management*, 18(2), 1000401.
- Hojeghan, S. B., & Esfangareh, A. N. (2011). Digital Economy and Tourism Impacts, Influences and Challenges. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 19, 308–316.
- Moleong. (2007). *Studi tentang terapi menulis ekspresif untuk menurunkan stres pada penderita gangguan psikosomatik*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Prasenja, Y., Alamsyah, A. T., & Bengen, D. G. (2017). *Analisis Keberlanjutan Ekosistem Mangrove Untuk Kegiatan Ekominawisata Di Pulau Lumpur Sidoarjo Sustainability Analysis Of Mangrove Ecosystem For Ecofisherytourism In Sidoarjo Lumpur Island*.
- Qodriyatun, R.N, Andina E, Suryani A.S, Indahri Y, P. U. . (2018). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Ekowisata*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Intans Publishing. Malang.
- Rini, N. M. (2013). *Transformasi Nelayan Menuju Taraf Kehidupan yang Lebih Baik: Dampak Pariwisata, Kebijakan Taksi Mina Bahari dan Ekonomi*. [http://www.academia.edu/8443030/Jurnal Masyarakat Pesisir](http://www.academia.edu/8443030/Jurnal_Masyarakat_Pesisir).
- Ross, S., & Wall, G. (1999). Evaluating Ecotourism: The Case of North Sulawesi, Indonesia. *Tourism Management*, 20(6), 673–682.

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional
Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

- Sabarisman, M. (2017). Perubahan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan “Pemberdayaan Melalui KUBE di Kelurahan Sayangsayang Kota Mataram.” *Sosio Konsepsia*, 17(3), 252–268.
- Santoso, S., Grady, W. M., Powers, E. J., Lamoree, J., & Bhatt, S. C. (2000). Characterization of Distribution Power Quality Events with Fourier and Wavelet transforms. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 15(1), 247–254.
- Suyono, S., Hendrarto, B., & Radjasa, K. O. (2015). Pemetaan Degradasi Ekosistem Mangrove dan Abrasi Pantai Berbasis Geographic Information System di Kabupaten Brebes-Jawa Tengah [Mapping of Mangrove Ecosystem Defradation and Coastal Abrasion Based on Geographic Information Systems in Brebes District, Central Java]. *Oceatek*, 9(01), 90–102.
- Tuwo, A. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut: Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Brilian Internasional.
- Wood, M. (2002). *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP.
- Yazdi, S. K. (2012). Renewable Energy, Nonrenewable Energy Consumption, and Economic Growth. *American International Journal of Social Science*, 1(1), 50–56.